BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pokok Bahasan

Pemerintah merupakan pelaku dari sebuah organisasi yang memiliki peran utama untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di suatu negara. Sesuai dengan peran yang dimiliki, pemerintah harus dapat melaksanakan akuntabilitas yang bersifat transparan dan akurat kepada masyarakat luas sebagai pihak yang memberikan kepercayaan kerja kepada pemerintah. Akuntabilitas yang dimaksud adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pemerintah.

Makna akuntabilitas seringkali disamakan dengan makna responsibilitas padahal keduanya berbeda. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan efektif. Responsibilitas adalah pertanggungjawaban organisasi atas kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip organisasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan bidang pemerintahan atau yang dikenal dengan sektor publik, akuntabilitas sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan akuntabilitas, maka pemerintah memiliki sebuah batasan apabila akan melakukan penyelewengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Akuntabilitas membuat

adanya sistem pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan.

Penyelenggaraan akuntabilitas pada bidang pemerintahan atau sektor publik hampir sama dengan sektor swasta atau bisnis umum yaitu sama-sama untuk menilai kinerja. Pada bidang pemerintahan atau sektor publik, kinerja yang dilihat adalah bagaimana kemampuan pemerintah menggunakan sumber daya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik sedangkan pada bidang swasta atau bisnis umum, akuntabilitas digunakan untuk menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam upaya menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan dalam operasi kegiatan usaha. Ada empat tipe penyelenggaraan akuntabilitas berkaitan dengan sektor publik, yaitu: tipe *compliance accountability, anticipatory accountability, negotiated accountability*, dan *discreationary accountability*. *Compliance accountability* dan *anticipatory accountability* tergolong dalam dimensi eksplisit yaitu yang tertulis atau terlihat dengan jelas misalnya birokrasi, sedangkan untuk *negotiated accountability*, dan *discreationary accountability* dalam dimensi implisit yaitu yang tidak tertulis misalnya nilai sosial dan budaya. *Compliance accountability* adalah tipe yang paling sempit sebab akuntabilitas hanya dilakukan apabila ada perintah atau keharusan saja. *Anticipatory accontability* adalah tipe di mana akuntabilitas baru akan dilakukan bila ada tekanan. *Negotiated accountability* adalah tipe akuntabilitas yang mengembangkan tatanan nilai-nilai sosial yang terkait. *Discreationary accountability* adalah tipe akuntabilitas yang paling baik karena berkaitan dengan masalah demokrasi di mana pelaksana pemerintahan diberikan

kebebasan akan tetapi kebebasan tersebut harus dipertanggungjawabkan seperti otonomi daerah. Masing-masing tipe ini akan menghasilkan respon yang berbeda baik itu yang *reactive* yaitu ada respon karena terpaksa akibat tekanan atau *proactive* yaitu ada respon untuk berkembang (dinamis) dengan sendirinya karena ada kebebasan.

Penerapan masing-masing tipe akuntabilitas sektor publik disesuaikan dengan ciri kebijakan dan regulasi yang ada pada suatu negara. Hal ini disebabkan kebijakan dan regulasi merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan, sehingga bagaimana tata cara untuk melakukan pertanggungjawaban atau kegiatan akuntabilitas yang digunakan sebaiknya sesuai dengan kebijakan atau regulasi yang diimplementasikan tersebut. Kesesuaian tipe akuntabilitas yang digunakan dengan kebijakan dan regulasi yang ada membuat makna akuntabilitas memiliki ketetapan dalam rangka pengukuran akuntabilitaas itu sendiri, sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

1.2. Pokok Bahasan

Pokok bahasan yang ditetapkan pada makalah ini adalah bagaimana tipe-tipe akuntabilitas sektor publik.

1.3. Tujuan Pembahasan

Tujuan pembahasan yang diharapkan dapat dicapai adalah memberikan pemahaman tentang tipe-tipe akuntabilitas sektor publik.